

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghin Hisma S

Nim : C51206030

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim PA Surabaya
Tentang Wali Adlal Karena Perbedaan Marga (Penetapan No:
376/Pdt.P/2008/PA. Sby)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Ghin Hisma/S
C51206030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ghin Hisma S NIM C51206030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP:197606132003121002

BAB II KEDUDUKAN WALI ADLAL DAN *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Wali Adlal	22
1. Pengertian wali adlal.....	22
2. Eksistensi wali adlal dalam perkawinan.....	24
3. Syarat-syarat seorang wali.....	29
4. Macam-macam wali.....	32
5. Alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara'	36
6. Dasar-dasar penetapan wali adlal.....	39
B. <i>Kafā'ah</i> dalam perkawinan.....	43
1. Pengertian <i>kafā'ah</i>	43
2. Eksistensi dan urgensi <i>kafā'ah</i> dalam perkawinan	43
3. Kriteria-kriteria <i>kafā'ah</i>	43

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA WALI TENTANG WALI ADLAL
KARENA PERBEDAAN MARGA PA SURABAYA**

A. Kompetensi Pengadilan Agama Surabaya	51
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya.....	53
C. Deskripsi Putusan Perkara Wali Adlal karena Perbedaan Marga	55

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci (*mīṣāqān ḡalīẓan*) antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan kedamaian, cinta dan kasih (*sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah*) di antara suami istri. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam QS ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹*

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri sebagaimana asas-asas hukum perkawinan itu meliputi asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kebebasan memilih

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), 406

pasangan dan lain-lain.² Namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.³

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi selain rukun-rukun yang lain seperti; adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi, ijab kabul adalah keharusan adanya wali nikah.⁴

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam hal perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 139

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 41

⁴ Team Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 10

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 69

Menurut Wahbah Zuhayli, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya.⁶ Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang menikahkan sendiri atau mewakilinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: *"Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal". (H.R Abu Daud)*⁷

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita sebagaimana dimuat dalam KHI pasal 20 yaitu harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Penetapan hakim PA Surabaya no: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby merupakan penetapan atas permohonan pengangkatan wali hakim dengan alasan wali menolak memberi izin dan enggan menikahkan (menjadi wali) karena perbedaan marga atau dalam bahasa hukum Islam tidak *sekufu'*. Kata *kufu'* atau *kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara

⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilatuhi*, Juz IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6690

⁷ Al-Imām Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistany, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab an-Nikāh, Juz II, No: 2083 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1999), 891

mengenai tolak ukur yang digunakan dalam penentuan *kafā'ah*. Namun Mayoritas *Fuqāhā'* sepakat menjadikan segi *dīn* (kesholehan dan istiqamah) sebagai kriteria *kafā'ah*.¹² Kesepakatan tersebut didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Surat as-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: *"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".*¹³

Penelitian ini mencoba menganalisa lebih lanjut tentang “Penetapan wali adlal oleh hakim PA Surabaya karena perbedaan marga. Maksud “marga” dalam kasus tersebut adalah perbedaan nasab (keturunan) kebangsaan dimana si wanita merupakan keturunan *Ahlul Bait* Nabi SAW (*syarīfah*) sedangkan pihak laki-laki memiliki latar belakang suku jawa (*non-syarīf*). Amar putusan menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah pemohon adalah wali adlal dengan dasar berbagai pertimbangan diantaranya seperti :

1. Keterangan saksi bahwa wali nikah pemohon menolak menjadi wali
2. Alasan penolakan wali tidaklah berdasarkan hukum sehingga pada dasarnya antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan

¹²Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 528

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an*, 416

- Dari aspek yuridis, putusan hakim tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku positif di Indonesia. Dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dīn*. Namun, *gholib* diketahui bahwa dalam budaya perjodohan perempuan keturunan ahlul bait (komunitas '*alawiyyun*')¹⁴ nilai-nilai perkawinan yang dianut secara turun-temurun (tradisi) adalah berlandaskan pada sistem patrilinear nilai *sekufu*/*kafa'ah* yang dipengaruhi Mazhab Syafi'iah.¹⁵

¹⁵ 'Abd al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), 51.

Pemaknaan yang ketat terhadap nilai *sekufu* tersebut menyebabkan perkawinan diharapkan berbentuk endogami bangsa (perkawinan sesama '*awwaliyun*) untuk perempuan, sedangkan eksogami bangsa (perkawinan campuran) diperkenankan bagi laki-laki. Dalam penerapan konsep *kafā'ah* ini, orang tua memegang peranan penting dalam menentukan perjodohan anak perempuannya. Bila ada seorang wanita menikah dengan laki-laki tanpa restu dari orang tua, maka orang tua menganggap bahwa anaknya keluar dari keluarganya tidak diakui lagi sebagai anak serta tidak boleh menyandang marga ayahnya sehingga hubungan orang tua-anak terputus karena dianggap tidak menjaga kemurnian nasab.¹⁶

Terlepas dari pemahaman ajaran agama yang mereka yakini, tradisi demikian boleh jadi merupakan warisan budaya Arab yang *patriarkhis* dimana Bapak adalah poros tali kekerabatan dalam keluarga. Sedangkan anak, dengan demikian, mengikuti garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya.¹⁷ Sayyid ‘Abd al-Rahman bin Muhammad al-Masyhur, dalam kitabnya “Bugyah al-Murtasyidin”,¹⁸ sebuah kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren hingga saat

¹⁶ Indah Choriratul Aini, *Persepsi Masyarakat Islam Keturunan Arab di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan*, Skripsi: Jurusan AS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

¹⁷ Khalil Abdul Karim, *al-Juz'ūr at-Tārīkhiyyah li as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Syari'ah: Sejarah perkembangan Pemaknaan) Terjemah: Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003) h. 77

¹⁸ Sayyid ‘Abd al-Rahman bin ‘Umar al-Masyhur, *Bugyah al-Murtasyidin*, (Beirut: Dārul Fikr, 1995), 132

ini, bahkan merupakan salah satu diantara buku standar di pengadilan Agama,¹⁹ memaparkan:

“Seorang syarifah yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah SAW, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fāṭimah az-Zahrā’ adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut”.

Dari uraian di atas tampak adanya sikap ekstrim dan ketegasan segolongan ulama dalam hal *kafā'ah* nasab seorang *syarīfah*. Implikasi hukum terhadap diberlakukannya konsep *kafā'ah* tersebut adalah bahwa tidak dapat ditetapkan sebagai wali adlal seorang wali yang menolak menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya dengan alasan calon yang diajukan tersebut tidak memenuhi kriteria *kafā'ah* atau tidak *sekufu'*, secara otomatis tidak dapat pula hak perwalian berpindah kepada wali hakim.²⁰

Atas dasar pemahaman tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada penetapan wali adlal oleh hakim PA Surabaya terhadap wali yang menolak menikahkan atau memberi izin menikah karena alasan perbedaan marga (tidak *sekufu*). Penelitian ini kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim PA Surabaya tentang Wali Adlal Karena Perbedaan Marga (Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby)”

¹⁹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 179

²⁰ Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 523

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat luas tentang wali adlal karena perbedaan marga dan *kafā'ah* nasab perempuan keturunan *Ahlul Bait* Nabi Muhammad SAW.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi serta studi banding Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang sama begitu pula bagi pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah wali adlal dan *kafā'ah* perkawinan perempuan keturunan *Ahlul Bait* Nabi Muhammad SAW.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang dapat ditemukan, kajian mengenai konsep wali adlal dan *kafā'ah* dalam perkawinan telah banyak dilakukan. Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqh ditemukan satu bab yang secara khusus membahas permasalahan nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fiqh perbandingan. Persoalan wali adlal dan *kafā'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada subbab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan subbab lain.

Diantara kitab-kitab Fikih yang mengulas tentang wali adlal dan *kafā'ah* dalam perkawinan adalah: *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhayliy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd al-Hāfiz, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV karya Abd. Rahman al-Jazairi, *al-Mugny*, juz VII karya Ibnu Qudamah, *Bugyatul Musytarsyidīn* karya 'Abd. Rahman bin Muhammad al-Masyhur, *Fiqh as-Sunnah*, juz II karya Sayyid Sābiq, *al-Aḥwal as-Syakhṣiyah* karya Abū Zahrah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, juz V karya Ḥusain bin 'Aurah al-'Awaisyah, dan lain-lain.

Disamping itu, Penelitian tentang wali adlal dan *kafā'ah* dalam perkawinan dengan berbagai aspek dan sudut pandang yang variatif juga telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantara penelitian tentang wali adlal dan *kafā'ah* yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Sidoarjo tentang Wali adlal Nomor: 80/Pdt.P/2007/PA. Sda” oleh Lina Mahmudah (2008). Ia mengonsentrasikan tulisannya pada bagaimana proses penyelesaian, pembuktian, dan bagaaimana pertimbangan majlis hakim PA Sidoarjo dalam menetapkan perkara tersebut.
2. Muhammad Ali (2008) dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama pasuruan Nomor: 02/Pdt.P/2008/PA. Pas Tentang Wali adlal Karena Calon Suami Muallaf”. Skripsi ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan

Kedua, Pengadilan Agama yang memutus perkara. Analisis penetapan dalam skripsi ini adalah merupakan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai judul diatas, penulis akan menegaskan sebagai berikut:

[illegible]

Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.²⁷

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur (bebas) dan dilakukan dengan tokoh agama yang bergelar *syarif* yang menganut pola perkawinan *sekufu* dalam hal nasab.

4. Metode analisis yang digunakan

Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-verifikatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan sebuah realitas yang terdapat dalam perkara tersebut secara sistematis dan jelas serta mendalam untuk selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut.

Kemudian digunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 376/Pdt.P/2008/PA. berupa proses penyelesaian perkara, dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam.

²⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 118

proses penyelesaian perkara wali adlal karena perbedaan marga di PA Surabaya (Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby), analisis terhadap dasar hukum dan dasar pertimbangan Hakim PA Surabaya tentang wali adlal karena perbedaan marga No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby, analisis hukum Islam terhadap penetapan perkara wali adlal karena perbedaan marga No: 376/pdt.p/2008/PA. Sby

Bab V penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberikan masukan kepada Pengadilan Agama Surabaya dan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KEDUDUKAN WALI ADLAL DAN *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Wali Adlal

1. Pengertian Wali Adlal

Secara harfiah (etimologi) kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu وَلِيّ - يَلِيّ - وَلَايَةٌ dengan bentuk jamak أَوْلِيَاءُ yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.¹ Perwalian disebut juga *al-walāyah* yang berarti penguasaan dan perlindungan.² Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.³ Atau dalam bahasa lain perwalian (*walāyah*) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴ Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dār al- Masyriq, Cet. 30, 1988), 918

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1146

³ Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I, (Fakultas Syari'ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991), 81

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 92

- a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.⁵

Kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah ‘ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah ‘ala al-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah ‘ala an-nafsi wa al-māli ma’an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah ‘ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.⁶

⁵ *Ibid.*, 93

⁶ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1997), 6691

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita.⁷

Adapun kata “Adlal” secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu:

عَضَلَ - يَعْضُلُ - عَضْلًا عَلَيْهِ yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”⁸

Secara terminologi, wali adlal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'* secara zalim, yaitu tanpa alasan syar'i.⁹

2. Eksistensi wali adlal dalam perkawinan

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Umat Islam Indonesia menganut pendapat Ulama Syāfi'iyah, Ḥanābilah, Hanafiah yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.¹⁰

Dasar disyaratkannya wali nikah ini bertitik tolak dari Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad dan at-Tarmizi

⁷ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah*, (Bangli: Ma'had Dārullughah Wadda'wah, 2005), 17

⁸ Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, 511

⁹ Ḥusain bin 'Aurah al-'Awaisyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V, (al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt), 138

¹⁰ Abdullah al-‘Abādi, *as-Sabīl al-Mursyid, Syarh Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Hadīs, Cet III, 2002), 1248 lihat pula; Abd al-Rahman Al-Jaziriy, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004), 42

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (an-Nur: 32)¹⁴

Dalam surat lain:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (al-Baqarah: 221)*

Dalam konteks umat Islam Indonesia, adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Jika wali yang berwenang tidak dapat bertindak menjadi wali dikarenakan tidak hadir atau sebab lain seperti sakit atau jarak yang jauh dan sulit ditempuh maka hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dalam kondisi seperti ini akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahkannya.¹⁵ Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُؤْكَلَ فِيهِ غَيْرُهُ

Artinya: *"Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain."*¹⁶

Keberadaan seorang wali diatur dalam Pasal 19 KHI yaitu bahwa dalam akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an*, 354

¹⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67

¹⁶ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 106

langsung pindah kepada hakim bukan kepada wali *ab'ad*.²⁰ Demikian pula pendapat Imām al-Syīrazi yang menyatakan bahwa jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi alasan yang tidak syar'i, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.²¹

Landasan argument yang mereka gunakan adalah hadis Nabi saw:

فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali baginya”. (H.R. al- Arb’ah selain an-Nasai. Berarti hanya Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dan dinilai shahih oleh Abu Ummah, Ibnu Hibban dan al-Hakim).²²

Menurut Abū Bakr ad-Dimyāṭi al-Bakri, yang dimaksud dengan “*Sultān*” dalam hadis tersebut adalah:

كُلُّ مَنْ لَهُ سُلْطَانَةٌ وَوَلَايَةٌ عَلَى الْمَرْأَةِ عَاماً كَانَ كَالْإِمَامِ أَوْ حَاصِ كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلَّى لِعَقُودِ
الْأَنْكَحَةِ

Artinya : “Semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti Imam ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah”.²³

Selain pendapat diatas mereka (Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Syāfi'iyah) juga berpandangan bahwa dalam kondisi adlal seorang wali dianggap berlaku

²⁰ Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy*, 6723

²¹Imām asy-Syirazy, *al-Muhazzab*, Juz II, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah,t.t), 429

²²Dāwud , *Ṣunan Abī Dāwud*, Juz II, 891

²³ Abū Bakr ad-Dimyati al-Bakri, *Iʾānah at-Tolibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1995),

zalim dan yang berwenang menegakan keadilan adalah hakim.²⁴ Dengan kata lain dalam perkara wali adlal seorang perempuan berhak mengadukannya kepada hakim untuk dinikahkan.

3. Syarat-syarat Seorang Wali

Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat.²⁵

Kompilasi Hukum Islam memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, batasan itu tertuang dalam pasal 20 ayat 1 KHI yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Perihal syarat seorang wali, Mayoritas Ulama sepakat dalam beberapa hal dan masih berdebat dalam beberapa hal lainnya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Cakap hukum (*kamāl al-ahliyyah*) yang meliputi baligh, aqil dan merdeka
- b. Antara wali dan wanita yang berada dibawah perwaliannya memiliki kesamaan agama (Islam), tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-'Imrān: 28 yang berbunyi:

²⁴ Zuhayliyy, *al-Fiqh al-Islāmiyy*, 6723 Lihat pula Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 523

²⁵ ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣul Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyah, tt).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya : *Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina dia menikahkan dirinya sendiri*".²⁹

- d. Adil (*al-‘adālah*), wali nikah harus memiliki sifat istiqamah dalam menjalankan kewajiban agama (luhur budi pekertinya) dan bukan orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Para Ulama yang menjadikan *al-‘adālah* sebagai syarat bagi wali nikah ialah Golongan Ḥanābilah dan Syāfi’iyah.³⁰
- e. *Rasyīd*

Wali disyaratkan harus orang yang *rasyīd* (berakal, bijaksana, cerdas). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *sāfiḥ* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Orang seperti ini mungkin akan menjodohkan perempuan di bawah perwaliannya dengan orang yang bodoh seperti ini, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai.³¹

²⁹ Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, 591

³⁰ *Ibid.*, 79

³¹ Tiharni, *Fikih Munakahat*, 104

4. Macam-macam Wali

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, ada beberapa macam wali diantaranya yaitu dari segi keturunan (wali nasab) dan wali hakim sebagaimana termaktub dalam pasal 20 KHI yang menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

a. Wali *nasab*

Wali *Nasab* adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut. Tertib wali menurut Imam al-Syāfi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, dan terus garis ke atas. Ayah dan kakek adalah mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut, jika ayah dan kakek tidak ada baru saudara-saudara seperti dalam urutan nasab di bawah ini, yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Datuk laki- laki (kakek)
- 3) Saudara laki- laki seayah atau seibu.
- 4) Saudara laki- laki seayah.
- 5) Anak laki- laki dari saudara laki- laki sekandung.
- 6) Anak laki- laki dari saudara laki- laki seayah.
- 7) Paman (saudara laki- laki ayah) kandung.
- 8) Paman (saudara laki- laki ayah) seayah.

- 6) Wali *aqrab* berbelit-belit atau mempersulitnya.³⁸

5. Alasan-alasan Keengganan Wali yang Dibenarkan oleh Syara'

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal. Alasan yang paling umum terjadi adalah disebabkan oleh adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali).

Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain:

- a. Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Ini adalah alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadis Nabi SAW:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ

³⁸ Sofiyuddin Abī al-‘Abbas, *al-‘Abāb al-Mubīl*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 1306

يَبْتَاعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يُخْطَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abd. Rahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir ra berpidato diatas mimbar, dia berkata “sesungguhnya Rasulullah berdo’a: orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu).³⁹

b. Calon suami jelek akhlaknya

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencari jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama, dan berakhlak baik, akan mempengaruhi isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik juga.

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib, “saya punya anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan? Hasan menjawab: “Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia tidak menganiayanya.”

³⁹ al-Ḥafīẓ Zakīy al-Dīn 'Abd al-Lāzīm al-Munẓirī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, No: 800, Terj. Singithy Djamaludin (Bandung: Mizan, 2002), 431

- 1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasab tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

- b) Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adanya wali dengan singkat atas permohonan calon mempelai wanita dan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.2 Tahun 1987 tersebut, maka penetapan adlalnya wali harus melalui sidang Pengadilan Agama, jika tidak maka keadlalannya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali adlal.⁴⁵

Adapun Tata cara penyelesaian wali adlal diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk menetapkan adlalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.
- 2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali dengan surat “permohonan”.
- 3) Surat permohonan tersebut memuat:
 - a) Identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”
 - b) Uraian tentang pokok perkara
 - c) Petitum.
- 4) Permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).

⁴⁵ *Ibid.*, 29-30

- 5) Penetapan adlalnya wali berbentuk voluntair.
- 6) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk di dengar keterangannya.
- 7) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat.
- 8) Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.
- 9) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengutamakan kepentingan Pemohon.
- 10) Untuk memperkuat adlalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
- 11) Apabila wali enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.
- 12) Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar adlal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan

pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepala KUA kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.⁴⁶

B. *Kafā'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *kafā'ah*

Secara bahasa *kafā'ah* berasal dari kata كَفَاءٌ yang berarti الْمُسَاوَةُ (sama) atau الْمُمَاثِلَةُ (seimbang).⁴⁷ Dalam firman Allah SWT disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafā'ah* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.⁴⁸ dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *kafā'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *kafā'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ibnu Manẓur mendefinisikan *kafā'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafā'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.⁴⁹

245 ⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VIII, 2008), 244-

⁴⁷ Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, 690

⁴⁸ al-Ikh̄lās (112): 4

⁴⁹ Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Bāb Kaf (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003), 681

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan

Mayoritas *Fuqāha'* (Hanābilah, Syāfi'iyah, dan Mālikiyah) menetapkan *kafā'ah* dalam perkawinan sebagai syarat *luzūm* bukan sebagai syarat sah. Maka suatu akad nikah dinyatakan sah meskipun tidak memenuhi kriteria *kafā'ah*.⁵⁰ Syarat *luzūm* mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang melakukan akad atau selain mereka memiliki hak untuk melakukan pemutusan (*faskh*) terhadap suatu akad nikah.

Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* maka akadnya sah dan bagi wali tersebut berhak *memfaskh* perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁵¹

3. Kriteria-kriteria *kafā'ah*

Para Ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para Ulama banyak

⁵⁰ Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy*, 6577

⁵¹ *Ibid.*, 6741

berbeda pendapat. Menurut Mālikiyah, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria *kafā'ah* hanya dari segi agama (*al-dīn*) dan bebas dari cacat (*al-hāḥ*).

Hānafiyyah berpendapat bahwa kriteria *kafā'ah* meliputi segi agama (Islam), kemerdekaan, nasab, kekayaan (*al-māl*) dan profesi/pekerjaan. Berkenaan *kafā'ah* dalam hal nasab ini Ulama Hānafiyyah mengkhususkan bagi bangsa Arab. Dasar argumen mereka adalah bahwa bangsa Arab begitu menjaga garis keturunan mereka. Disisi lain, suatu “marga” bagi bangsa Arab adalah salah satu simbol kebanggaan atau identitas sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sama halnya dengan Mazhab Syāfi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafā'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan pekerjaan dan bebas cacat.⁵² Adapun dari kalangan Hanābilah, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syāfi'i, dengan catatan Ahmad mengeluarkan urusan bebas dari aib secara jasmani.⁵³

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masalah *kafā'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957),

Hāsyim dan Bani Muṭalib hanya dapat *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.⁵⁹

c. Segi pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.⁶⁰ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili.⁶¹ Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu'*.

⁵⁹ al-Jazairy, *al-Fiqh 'Alā*, 51

⁶⁰ ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, Jilid VI, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1967), 258

⁶¹ *Ibid.*

d. Segi kekayaan

Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.⁶²

e. Segi bebas dari cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu*’ dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.⁶³

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi nilai kesepadan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafā'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.⁶⁴

Jika melihat pada al-Qur'an dan al-Sunnah ditinjau dari segi kemanusiaan, manusia itu sama seperti tersebut dalam al-Hujurāt ayat 13

⁶² Zuhayliyy, *al- Fiqh al-Islāmiyy*, 6753

⁶³ al-Jaziriy, *al-Fiqh 'alā*, 58

⁶⁴ *Ibid.*, 60

**PENYELESAIAN PERKARA WALI ADLAL KARENA
PERBEDAAN MARGA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa :
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹

Batas antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989² jo UU No. 3 Tahun 2006³, maka kekuasaan dan kewenangan

² Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Wilayah Kota Madya Surabaya adalah Seluas 290, 64 KM2, yang terdiri

dari:

- | | | |
|--------------------|--------|-----------|
| - Surabaya Pusat | seluas | 14,54 km |
| - Surabaya Utara | seluas | 26,84 km |
| - Surabaya Timur | seluas | 85,88 km |
| - Surabaya Selatan | seluas | 107,41 km |

Wilayah yuridiksi atau wilayah hukum (kompetensi relative) dari Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya, terdiri dari : 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.⁴

Kecamatan tersebut adalah Jambangan, Gayungan, Wiyung, Wonokromo, Wonocolo, Pabean Cantikan, Semampir, Kenjeran, Bulak, Gubeng, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambak Sari, Tenggilis Mejoyo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Sawahan, Asemrowo, Benowo, Pakal, Lakarsanti, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tegal Sari, Bubutan, Genteng, Simokerto, Krembangan.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur Organisasi dalam lingkungan PA Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung

⁴ <http://www.pa-surabaya.go.id>

Pada Struktur Organisasi Peradilan Agama Surabaya sebagaimana terlampir terlihat:

1. Bagan sebelah kiri meliputi hakim, panitera pengganti termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi “fungsional” peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan sedangkan panitera muda adalah pejabat struktural yang ikut “menunjang” tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan.
2. Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan tersebut merupakan suborganisasi baik langsung atau tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun sebagai subbagian yang bertugas sebagai pendukung umum organisasi pengadilan, peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.
3. Dalam bagan/struktur, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU No 7 Thn 1989, hanya

mempunyai hubungan struktural dengan panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris.

4. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua dan wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) UU No 3 Thn 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Secara organisatoris ketua sebagai unsur pimpinan diberi kewenangan untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku semua organ, termasuk para hakim. Namun khusus pengawasan terhadap hakim harus berupa pengawasan yang bersifat fungsional dalam arti tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁵

C. Deskripsi Penyelesaian Perkara Wali Adlal Karena Perbedaan Marga

1. Kasus Posisi

Penjelasan tentang kasus posisi yang ada dalam skripsi ini disarikan dari Penetapan PA Surabaya No: 376/Pdt. P/ PA. Sby. Kasus ini terjadi pada tahun 2008 tepatnya terdaftar pada register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Desember 2008 No. 367/ Pdt.P/PA.Sby.

Karena merupakan perkara gugat *volunteer* maka gugatan diajukan secara “sepihak” yang disebut Pemohon. Dari putusan penetapan ini (No. 367/ Pdt.P/2008/PA. Sby) diketahui bahwa Pemohon adalah seorang wanita

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet V, 2009), 117

usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Manukan Tohirin No. 60 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Adapun Pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta-kasih \pm 5 tahun dengan seorang laki-laki pilihannya sendiri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Atas dasar saling mencintai, mereka bermaksud akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara resmi. Sebagaimana aturan yang berlaku di masyarakat, Calon Suami Pemohon menyampaikan maksud tersebut kepada Wali Pemohon (melamar) dengan baik-baik akan tetapi sebagai wali dari Pemohon menolak niat baik Calon Suami Pemohon tersebut dengan alasan perbedaan marga. Pemohon pun telah berusaha menyampaikan maksud tersebut kepada Wali Pemohon dengan baik untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi usaha ini tetap tidak membuahkan hasil. Karena sudah memiliki tekad yang kuat untuk melangsungkan pernikahan dan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memanggil Wali Pemohon beserta Pemohon dan Calon Suami

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan, bahwa wali nikah Pemohon sebagai wali adlal
- 3) Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya wali hakim
- 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau apabila peradilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Dalam memahami pandangan hidup suatu masyarakat (komunitas), kita bisa mempelajarinya melalui catatan-catatan masyarakat tersebut. Catatan itu bisa bersifat tulisan atau pun dari tradisi yang berkembang pada masyarakat.

Wali Pemohon adalah keturunan *Ahlul Bait* Rasulullah SAW (*syarīf*). Sebagaimana keturunan *Ahlul Bait* Nabi SAW lainnya ia memiliki falsafah hidup untuk senantiasa menjaga keberlangsungan eksistensi *zuriyyah* Rasulullah SAW dengan cara mengawinkan putri-putri mereka (*syarīfah*) dengan orang yang *sekufu'* (*syarīf/sayyid*).

Abdurrahman al-Masyhūr, seorang *Sayyid* menegaskan bahwa seorang *syarīfah* dilarang keras menikah dengan *non-syarīf* atau *non-sayyid*

meskipun *syarīfah* tersebut dan walinya menyetujuinya. Sebab menurutnya nasab yang mulia dan sah ini tidak ada yang sepadan dengannya kecuali dengan orang yang satu marga (*sekufu*) yaitu keturunan Faṭimah az-Zahra'. Ia memaparkan bahwa pernah suatu ketika di Negara Mekkah al-Mukaramah terjadi pernikahan antara laki-laki Arab dengan *syarīfah*. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari seluruh *sādah* yang didukung oleh para ulama yang ada pada saat itu untuk menceraikan isterinya (*faskh*) dan usaha tersebut berhasil. Peristiwa demikian juga terjadi di negara-negara lain. Para *asyrāf* dan ulama menentang keras pernikahan tersebut dan berusaha keras agar hal ini tidak di anggap hal remeh. Ia menambahkan bahwa walaupun ada di antara ulama yang membolehkan, tetapi ulama *salaf*(golongan *alawi*) memiliki *ijtihad* yang sukar bagi seorang *fāqih* memahami rahasianya. Maka menurut Abdurahman jalan terbaik adalah menerima pendapat mereka karena merupakan jalan keselamatan dan terhindar dari penyesalan.⁶

Sebagai bahan penguat pendapatnya, Abdurahman menyatakan bahwa tidak sedikit diantara ulama *salaf* yang dimaksud telah sampai pada derajat *mujtahid*, makam kewalian bahkan wali *qutub*. Pada masa tersebut tidak pernah ada yang berani melamar putri-putri mereka (*syarīfah*) dari kalangan selain ‘*alawiyyun*. Kalaupun diperbolehkan, itu harus dengan catatan adanya kekhawatiran terjadinya *mafsadah* yang benar-benar serius di antara

⁶ 'Abdurrahman al-Masyhūr, *Bugyah al-Mustarsyidin*, 132

keduanya, misalnya jika dia (*syarīfah*) tidak dinikahkan dengan laki-laki bukan *sayyid* akan terjadi perzinahan diantara keduanya.⁷

Perihal *kafā'ah* nasab bagi seorang *syarīfah* ini, Segaf Hasan Baharun, Pimpinan PP Darul Lugah wa Da'wah Putri dan merupakan seorang *syarīf* berpandangan bahwa adalah benar al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Sebagai contoh para Sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang mulia walaupun mereka bukan dari kalangan *ahlul bait*. Mereka adalah orang yang bertakwa, taat, setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi kemuliaan itu disebabkan oleh amal kebajikan yang mereka usahakan. Ada keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh para Sahabat Nabi SAW yang bukan *ahlul bait*. Sebab para anggota *ahlul bait* secara kodrati dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan keturunan (hubungan biologis) dengan manusia pilihan yaitu Rasulullah SAW.⁸

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa penolakan Wali Pemohon (adlal) dalam kasus ini adalah dalam konteks kecintaan dan kebanggaan pada nasabnya yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai manifestasi rasa cinta serta syukur atas anugrah kemuliaan yang tidak dapat diraih oleh semua orang, Wali Pemohon berusaha untuk tetap menjaga

⁷ *Ibid.*,

⁸ Segaf Hasan Baharun, *Wawancara*, Bangil: Pon-Pes Darulughah wa Dakwah Putri, 20 Februari 2010

Berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut pada masa itu (*patriarkhi*) maka pada hakikatnya garis keturunan Nabi SAW terputus. Hal ini disebabkan Putra Rasulullah SAW sebagai penerus keturunannya yaitu ‘Abdullah, Ibrāhim dan Qāsim meninggal ketika masih kecil. Ulama yang menjadikan Fāṭimah az-Zahrā’ sebagai penerus yang melahirkan *ẓuriyyah* Nabi SAW semata-mata karena kemuliaan, keagungan dan martabat ayahnya (Nabi Muhammad SAW) yang begitu tinggi. Dengan demikian maka *ẓuriyyah* Nabi SAW dari putrinya (Siti Fatimah r.a) merupakan kelanjutan dari keluhuran dan kemuliaan martabat Nabi SAW tersebut, Salah satu dalil yang digunakan untuk meligimitasi keabsahan pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Siti Fatimah r.a oleh Ṭabrani yakni bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ بَنِي أُمِّ يَتَّمُونَ إِلَى عَصَبَةِ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ " .

Jalaluddin Rakhmat menyatakan bahwa pada abad permulaan, kata “*syarīf*” ditujukan kepada siapa saja yang termasuk ahlul bait, baik ia dari keturunan Hasan dan Husein, atau Alawi dari keturunan Muhammad bin Hanafiyah atau putera lainnya dari Ali bin Abi Thalib, Ja’far, Aqil maupun Abbas. Namun tatkala pemerintahan di Mesir dipegang oleh golongan Faṭimiyyah, maka kata “*syarīf*” khusus diperuntukkan bagi keturunan Hasan dan Husein dan hal ini berlangsung hingga sekarang.¹²

3. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Mengabulkan Permohonan Wali Adlal karena Perbedaan Marga (Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby)

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini yaitu *Pertama*, keterangan dari Calon Suami Pemohon bahwasanya ia telah berusaha datang melamar ke Wali Pemohon akan tetapi ditolak serta pengajuan permohonan dari Pemohon agar Wali Pemohon dinyatakan adlal oleh karena menolak menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon serta meminta kepada hakim agar diizinkan untuk menikah dengan wali hakim.

Kedua, berdasarkan keterangan Calon Suami Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa Calon Suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon kepada walinya tetapi tidak ada tanggapan. Hal ini dikuatkan pula keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan

¹² Jalaluddin Rakhmat, *Teladan Suci keluarga Nabi*, (Bandung: Mizan, Cet X, 1998), 93

- a. Foto copy Penolakan Pernikahan dari KUA. Kec. Tandes bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1),
- b. Foto copy surat izin melaksanakan pernikahan dari Kepala Kepolisian Resor Probolinggo bermaterai cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)

Keempat, berdasarkan alasan dari Wali Pemohon tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38, 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam

dan agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang terlarang maka seyogyanyalah keduanya segera dinikahkan

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya. Dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor dan Tahun 1989.

Setelah melalui proses peradilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah sebagai wali adlal
- 3) Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya dengan wali hakim
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 268.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Penetapan PA Surabaya No: 376/Pdt. P/ PA. Sby. ini
dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 M,
bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TENTANG WALI ADLAL KARENA PERBEDAAN MARGA
(PENETAPAN NO: 376/PDT.P/2008/PA. SBY)**

A. Analisis Terhadap Proses Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Wali Adlal Karena Perbedaan Marga (No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby)

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib mengkonstatir,¹ mengkualifisir peristiwa/perkara yang telah terbukti² untuk kemudian mengkonstituirnya³. Proses penyelesaian perkara wali adlal yang terjadi PA Surabaya karena perbedaan marga tersebut sebagaimana tergambar dalam isi putusan Penetapan No. 376/Pdt.P/2008/PA. Sby menunjukkan adanya tahap-tahap penyelesaian secara rinci dan kronologis hubungan hukum antara fakta-fakta yang telah terbukti mengenai adlalnya Wali Pemohon, pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan Hakim PA Surabaya tersebut.

¹ Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan

² Mengkualifisir fakta yang telah terbukti adalah menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

³ Mengkonstituir adalah menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan

Hal ini dapat dinilai dari dasar penetapan Hakim PA Surabaya dalam kasus wali adlal ini yakni pasal 2 ayat(1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan Hadis Nabi SAW:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيِّ لَهُ

Artinya: “Apabila para wali menolak menjadi wali maka kepala Negara menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”

Kalimat فَإِنْ تَشَاجَرُوا (apabila wali menolak) merupakan “syarat”

berlakunya pengangkatan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkara wali adlal. Untuk mengetahui kebenaran fakta akan penolakan wali perlu adanya bukti. Dari data yang diperoleh terbukti bahwa Wali Pemohon menolak menjadi wali nikah bagi Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang berasal dari Calon Suami Pemohon, Pemohon itu sendiri dan keterangan beberapa orang saksi serta alat bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon. Bukti tersebut pada hakikatnya sudah cukup sebagai dasar pertimbangan yang digunakan untuk memastikan status adlalnya Wali Pemohon. Akan tetapi, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor penolakan wali tersebut. Sebab boleh jadi penolakan wali tersebut memiliki landasan hukum.

Sebagaimana termaktub dalam isi penetapan PA Surabaya No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby bahwa alasan wali dalam kasus ini adalah perbedaan marga. Dari sekian ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal-pasal yang dianggap relevan dengan kasus ini yang kemudian dijadikan dasar hukum di antaranya adalah pasal 8 , 9, 10, 11 Undang-undang Perkawinan No 1Thn 1974 dan pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkwinan.

Demikian halnya dalam menjalankan tugas yudisial, Hakim Peradilan Agama memiliki tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses penelitian, tata cara penyelesaian perkara wali adlal karena perbedaan marga di Pengadilan Agama Surabaya ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam tiga faktor yaitu: a) proses administratif yang dilakukan pihak yang berperkara b) kompetensi peradilan yang menangani perkara dan c) proses penyelesaian perkara. Kesesuaian proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam kasus ini dapat dilihat dalam aspek berikut:

1. Proses administratif.

- a. Pengajuan surat permohonan. Proses pengajuan surat permohonan ini telah dilakukan pihak calon mempelai wanita dengan melampirkan bukti-bukti terkait yaitu: fotocopy surat penolakan dari pihak KUA. Kec. Tandes bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan

(P.1) dan fotocopy surat izin melaksanakan pernikahan dari Kepala Kepolisian Resor Probolinggo bermaterai cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2).

- b. Isi surat permohonan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita (Pemohon) telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Identitas calon mempelai wanita selaku pihak Pemohon 2) Uraian tentang pokok perkara 3) Petitum, yaitu mohon penetapan adlalnya Wali Pemohon dan penetapan izin untuk menjadikan wali hakim sebagai wali nikah dalam pernikahannya.

2. Kompetensi peradilan yang menangani proses penyelesaian perkara.

- a. Kompetensi absolut. Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang wali adlal. Maka Berdasarkan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.
- b. Kompetensi relative. Tempat kediaman/tempat tinggal Pemohon adalah di Manukan Tohirin No. 60 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Berdasarkan kompetensi relative Pengadilan Agama maka adalah tepat jika Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya sebab tempat tinggal Pemohon adalah termasuk dalam wilayah yuridiksi PA Surabaya.

3. Proses penyelesaian perkara.

- a. Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara ini telah menetapkan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula Wali Pemohon tersebut meskipun pada kenyataannya Wali Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.
- b. Hakim telah mempertimbangkan segala keterangan baik dari Pemohon, Calon Suami Pemohon, keterangan saksi dan alat bukti tertulis.
- c. Acara pemeriksaan dan penetapan wali adlal dalam perkara ini telah dilakukan secara singkat
- d. Perkara wali adlal adalah merupakan perkara voluntair maka adalah benar jika PA Surabaya mengeluarkan putusan berupa penetapan
- e. Dasar penetapan Hakim PA Surabaya dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adlal oleh Pemohon dalam perkara yang di daftar pada register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Desember 2008 No. 367/ Pdt.P/PA.Sby. adalah bahwa Hakim tersebut berpendapat bahwa Wali Pemohon telah benar adlal dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan pernikahan melalui wali hakim.

B. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Surabaya Dalam Penetapan Perkara Wali Adlal Karena Perbedaan Marga No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby

Setiap putusan haruslah mencantumkan dasar pertimbangan (*basic reason*) dan dasar hukum. Pasal 62 UU No 7 Thn 1989 menyatakan bahwa : “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Secara keseluruhan Penetapan PA Surabaya No. 376/Pdt. P/ 2008/PA. Sby, telah memenuhi kriteria putusan yang memiliki dasar pertimbangan (*basic reason*) yang cukup dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dasar pertimbangan dan dasar hukum Hakim PA Surabaya dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam Bab III adalah:

1. Keterangan Calon Suami Pemohon, Pemohon, beberapa orang saksi yang menerangkan tentang penolakan Wali Pemohon terhadap lamaran Calon Suami Pemohon dengan alasan perbedaan marga di antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon.
2. Berdasarkan metode penafsiran *argumentum a contrario* terhadap UU yang berlaku khususnya pasal 8, 9, 10, 11 UU No 1 Thn 1974 dan pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI tentang larangan perkawinan, Hakim PA Surabaya menyimpulkan bahwa alasan perbedaan marga khususnya perkawinan antara

Pemohon yang seorang *Syarifah* dengan Calon Suami Pemohon yang bukan *Syarif* tidak dapat dijadikan alasan penghalang perkawinan.

3. Karena tidak memiliki dasar hukum wali tersebut ditetapkan sebagai “wali adlal” sebagaimana definisi wali adlal itu sendiri yaitu wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'* secara zalim atau tanpa alasan *syar'i*. Dalam konteks ke-Indonesiaan seseorang ditetapkan sebagai wali adlal manakala menolak menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Dasar pertimbangan Hakim PA Surabaya lainnya adalah demi kemaslahatan kedua belah pihak (Pemohon dan Calon Suami Pemohon) agar tidak terjerumus melakukan hal-hal terlarang jika tidak segera dinikahkan mengingat hubungan asmara antara Pemohon dan calon Pemohon telah berangsur cukup lama (5 tahun). Rasulullah SAW tegas menganjurkan untuk segera menikah bagi orang yang telah mampu untuk menikah melalui sabda Nabi saw:

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Barang siapa di antara kalian mempunyai bekal hendaklah ia kawin. Karena perkawinan itu dapat lebih memejamkan mata (dari hal yang diharamkan) dan

*menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu untuk kawin maka supaya berpuasa, karena puasa itu dapat menahan nafsu*⁸

Besarnya peluang kearah perzinahan menjadikan hukum nikah bagi Pemohon dan Calon Pemohon yang pada awalnya mubah bisa berubah menjadi wajib.

Alasan ketentuan tersebut adalah bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat hal-hal terlarang (zina). Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri dari perbuatan zina itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ
وَاجِبٌ

Artinya : *"Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula"*⁶

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : “Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”⁷

Berubahnya hukum perkawinan dari hukum asal (mubah) menjadi wajib adalah berlaku bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, sanggup memikul beban kewajiban dalam hidup berumah tangga, serta ada kekhawatiran apabila

⁵ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1999), 873

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 95

⁷ *Ibid.*, 31

adlal ini dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 62 UU No 7 Thn 1989

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali Adlal karena Perbedaan Marga No: 376/pdt.p/2008/PA. Sby

Seorang wali dengan segala otoritasnya terhadap perempuan di bawah perwaliannya berhak menikahkan anak perempuan tanpa izinnya (hak *ijbār*) dengan syarat-syarat sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Demikian pula ia tidak dibenarkan menghalang-halangi perkawinan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'i*. jika hal tersebut dilakukan seorang wali dihukumi adlal terhadap perempuan tersebut dan bagi pihak perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adlal kepada pejabat yang berwenang yaitu Hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa alasan adlalnya wali dalam perkara yang didaftarkan pada register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Desember 2008 No. 367/Pdt. P/PA. Sby adalah semata-mata karena perbedaan latar belakang garis keturunan (marga). Terma marga erat kaitannya dengan keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Perbedaan marga mengandung arti perbedaan asal usul atau keturunan seseorang (nasab). Dalam terma *Fiqh al-Islām* alasan wali dalam perkara ini disebut tidak *sekufu'* dari aspek latar belakang garis keturunan.

Mayoritas Ulama Mazhab sepakat bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam kualifikasi segi-segi *kafā'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan.

Apabila dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami isteri, half ini merupakan tuntutan wajar untuk tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami dan isteri, sering terjadi perbezaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan perceraian, dan sering pula berakibat terputusnya perkawinan.

Ukuran keseimbangan dalam perkawinan tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk masalah *ijtihādiyyah* yang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun al-Qur'an dan Sunah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran kafaah ini, para *fuqāhā* membahasnya dengan amat teliti dan terperinci.

Perbedaan marga yang digunakan wali sebagai alasan tidak *kufu'* dalam perkara ini adalah antara *syarīfah* atau wanita keturunan Rasulullah saw dengan pihak laki-laki berasal dari suku yang berbeda yaitu suku Jawa. Dalam komunitas keturunan Rasulullah SAW ada anggapan bahwa seorang *syarīfah* harus menikah dengan sesama keturunan Rasulullah saw (*syarīf*) juga. Alasannya adalah bahwa antara *syarīfah* dan non-*syarīf* itu tidak ada *kafā'ah*.

Jika merujuk pada pendapat para ulama seperti Mazhab Ḥanafī yang mengakui eksistensi *kafā'ah* dalam nasab khususnya bagi bangsa Arab begitupula Mazhab Syāfi'i dan Ḥanābilah maka dapat disimpulkan bahwa alasan wali dalam perkara ini adalah sesuai dengan tuntunan hukum Islam (*syar'i*). sebagaimana telah disebutkan bahwa ada beberapa alasan keengganan wali (adlal) yang dibenarkan oleh *syara'* di antaranya yaitu:

- Hadits Nabi **لِحَسْبِهَا** (kemuliaan/nasabnya) disinyalir mengandung pengertian bahwa keturunan (nasab) adalah salah satu pendorong laki-laki untuk kawin dengan wanita. Dalam unsur nasab ini al-Habīb al-Mawardi al-Baṣri menyebutkan 3 golongan yaitu pertama golongan Quraisy, kedua golongan Arab dan ketiga golongan Ajam.

Menanggapi dualisme pemikiran di atas, menarik untuk mengutip pandangan ulama kontemporer, Wahbah Zuhayliy dalam bukunya “*al-Fiqh al-Islāmiy wa Addilatuhu*” yang mengungkapkan bahwa pendapat yang diusung kelompok Mālikiyyah tampak lebih unggul dibanding yang lain karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan (*al-musāwah*). Islam

a. Kesamaan agama antara Calon Suami Pemohon dan Pemohon yaitu sama-sama beragama Islam

c. Dari segi pendidikan, Calon Suami Pemohon tergolong orang yang cukup berpendidikan hal ini bisa dilihat dari profesi Calon Suami Pemohon yaitu POLRI.

Mengenai kondisi ini Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang bisa kamu terima agama dan akhlaknya (untuk mengawini anak-anak perempuanmu), maka

*kawinkan-lah dia. Sebab, kalau hal itu tidak dilakukan, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan menjadi kerusakan berat.*¹⁴

Dari hadis di atas, dapat kita pahami bahwa jika telah terlihat adanya indikasi (*qarīnah*) yang menunjukkan bahwa Calon Suami Pemohon “dianggap” telah memenuhi kriteria sebagai calon suami yang bisa memimpin rumah tangga untuk mencapai keluarga *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* baik di dunia maupun di akhirat maka sudah seharusnya lamaran calon menantu itu diterima oleh wali.

Dari beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang dikemukakan Hakim PA Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini tidak ada satu point pun pertimbangan ataupun dasar hukum Hakim yang menyebut secara langsung perihal perkawinan seorang *syarīfah*. Dalam pengertian lain Hakim PA Surabaya menafikan secara mutlak pendapat *Fuqāha'* (Syāfi'iyah, Ḥanābilah, Ḥanafiyah) yang mengusung ide eksistensi *kafā'ah* nasab lebih-lebih *kafā'ah* nasab bagi golongan *Syarīfah* dalam perkawinan sebagaimana pandangan 'Abdurrahman al-Masyhur. Hal ini bisa dipahami oleh karena hakim pada saat ini terikat pada ketentuan yang berlaku positif di Indonesia salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian memposisikan hukum Islam di Indonesia. Artinya, sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, KHI dapat ditegakan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam

¹⁴ al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qozwainiy, *Sunan Ibnī Mājah*, Juz I, *Bab al-Akfa*, Ḥadīṣ No:1967 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 618

Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di di Lingkungan Peradilan Agama diarahkan kedalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Sehingga dalam suatu proses perdilan tidak boleh menyimpang dari rumusah kaidah Kompilasi. Dalil *ikhtilāf* atau pendapat dan doktrin mazhab tidak dapat lagi jadi sumber pertentangan.

Mengenai hal ini, Bustanul Arifin menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa ada “tiga pilar” soko guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan. Tiga pilar tersebut adalah a) adanya Badan Peradilan yang terorganisasi berdasar kekuatan Undang-undang b) Adanya organ pelaksana c) Adanya sarana hukum sebagai rujukan yang pasti dan berlaku secara *unifikasi* (persamaan persepsi dalam penerapan hukum).¹⁵

Dengan adanya unifikasi dalam penerapan hukum di Indonesia. Maka perdebatan seputar *kafā'ah* nasab bagi seorang *syarifah* hanya berlaku di luar peradilan dan dalam tataran doktrin yang selalu “*debatable*” tanpa ada payung hukum yang menaunginya.

¹⁵ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, 23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang wali adlal karena perbedaan marga (Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby) adalah sesuai dengan prosedur tata cara penyelesaian perkara wali adlal di Pengadilan Agama
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara wali adlal No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby adalah keterangan akan adlalnya wali Pemohon dari berbagai pihak terkait dan alat bukti tertulis. Selain itu, antara Pemohon dan Calon Suami pemohon tidak ada hal-hal yang dapat melanggar hukum untuk melangsungkan pernikahan serta demi kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjerumus kedalam perilaku zina.

Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini adalah:

1. Pasal 8, 9, 10 tentang larangan perkawinan UU No 1 Thn 1974
2. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 tentang larangan perkawinan KHI

Pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa alasan perbedaan marga sebagai latar belakang adlalnya wali sebagai faktor yang bisa melarang

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya juga mendasarkan penetapannya pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam serta Hadis Rasulullah SAW tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim.

3. Ditinjau dari Hukum Islam, Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan wali nikahnya adlal, adalah sudah tepat baik secara hukum materiil dan hukum formil, karena di dasarkan atas hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Bagi para wali hendaknya mengkomunikasikan dengan baik terhadap kehendak dan niat baik wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan akad nikah. Selama calon suami putrinya sepadan dari segi agama peluang untuk meraih tujuan pernikahan yaitu membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* senantiasa bisa terealisasikan.
2. Bagi para *syarifah*, disamping menjadikan faktor *religious equality* sebagai kriteria terpenting dalam memilih jodoh, faktor menjaga keberlangsungan eksistensi Keturunan Nabi SAW hendaknya dipertimbangkan pula sebab hal demikian lebih utama.

3. Bagi penegak hukum hendaknya bersikap lebih arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara wali adlal terkait perkawinan seorang *syarifah* demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta, Kencana, 2007
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006
- Abdullah al-‘Abādi, *as-Sabīl al-Mursyid, Syarh Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Kairo, Dār al-Hadīs, 2002
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003
- al-‘Abbas, Ṣofiyuddīn Abī al-‘Abāb al-Muḥīt, Beirut, Dār al-Fikr, t.t
- al-‘Awāisyah, Ḥusain bin ‘Aurah, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, al-Maktabah al-Islāmiyyah, Dār Ibn Hazm, t.t
- al-Bakri, Abū Bakr ad-Dimyāṭi, *I‘ānah at-Ṭalibīn*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995
- al-Baṣri, Imām Māwardi *al-Ḥawī al-Kabīr*, Beirut-Libanon, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t
- al-Būṭy, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍan, *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah fī Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2005
- al-Ḥāfiz, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazmainiy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dār al-Fikr, 2004
- al-Ḥafiz, Zakiy al-Dīn ‘Abd al-Lāzim al-Munziri, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, Terjemahan Sinqithy Djamaludin, Bandung, Mizan, 2002
- al-Ḥusaini, Imām Taqiyuddīn Abī Bakar Bin Muḥammad, *Kifāyatul Akhyār Fī Ḥallī Gayah al-Ikhtiṣār*, Semarang, Thoha Putra, t.t
- al-Jaziriy, ‘Abd al-Raḥman, *Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Kairo, Dār al-Hadīs, 2004

M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati, 2007

al-Masyhur, Sayyid ‘Abd al-Rahman bin ‘Umar, *Bugyah al-Murtasyidīn*, Beirut, Dār al Fikr, 1995

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo, Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Pius A Partanto, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arloka, 1994

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut-Lebanon, Dār al-Fikri, 2006

Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah*, Bangil, Ma’had Dārullughah (Wadda’wah), 2005

Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Syarifuddin al-Musawi, *al-Kalimah al-Gharra’ fi tafdīl az-Zahrā’ wa Aqilah al-Wahy* Terjemahan Hidayatul Rahman, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, t.t

Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilatuhu*, Beirut, Dār al-Fikr, 1997

Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* Malang, Bayu Media Publishing, 2007

